

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mengetahui pelaksanaan belanja pendidikan, belanja kesehatan, belanja modal, dan belanja pegawai di daerah dan pengaruhnya terhadap pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Indonesia. Periode penelitian dilakukan pada periode 2015 sampai dengan 2018 dengan observasi sebanyak 312 pemerintah daerah. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja pendidikan, kesehatan, belanja modal, dan belanja pegawai daerah secara simultan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia

Prob > chi2 pada persamaan I dalam menguji pengaruh belanja pendidikan dan belanja kesehatan dengan variabel kontrol IKK, jenis pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai sebesar 0,0000 dengan Adj-R² sebesar 0,5311. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan manusia dimana persamaan tersebut dapat menjelaskan variabel pembangunan manusia sebesar 53,11%.

Prob > chi2 pada persamaan II dalam menguji pengaruh belanja modal dan belanja pegawai dengan variabel kontrol IKK, jenis pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi memiliki nilai sebesar 0,0000 dengan Adj-R² sebesar 0,5736. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja modal dan pegawai berpengaruh secara simultan terhadap pembangunan manusia dimana persamaan tersebut dapat menjelaskan variabel pembangunan manusia sebesar 57,36%.

2) Belanja pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Nilai probabilitas dan koefisien variabel dari belanja pendidikan terhadap pembangunan manusia masing-masing adalah sebesar 0,0000 dan -1,1943. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM, namun pengaruh tersebut berarah negatif. Belanja pendidikan berpengaruh negatif disebabkan karena pemerintah daerah melakukan efisiensi dalam pelaksanaan belanja pendidikan. Belanja pendidikan telah mencapai batas maksimal yang diperlukan ataupun yang dapat dikelola secara optimal dalam pelaksanaan pendidikan. Meskipun dilaksanakan efisiensi belanja, hal tersebut tidak menyebabkan penurunan IPM.

3) Belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Nilai probabilitas dan koefisien variabel dari belanja kesehatan terhadap pembangunan manusia masing-masing adalah sebesar 0,0000 dan 2,3313. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM, dan pengaruh tersebut berarah positif. Hasil estimasi regresi tersebut

mengindikasikan bahwa pelaksanaan belanja kesehatan oleh pemerintah daerah telah dilaksanakan secara efektif, sehingga peningkatan belanja kesehatan oleh pemerintah daerah akan menyebabkan peningkatan IPM. Diduga pelaksanaan belanja pada sektor kesehatan disebabkan oleh (1) meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban belanja pada sektor kesehatan sebesar 10% dari APBD di luar gaji dan (2) formulasi yang tepat dalam mengalokasikan pada belanja modal, belanja pegawai dan juga belanja operasional lain.

- 4) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Nilai probabilitas dan koefisien variabel dari belanja modal terhadap pembangunan manusia masing-masing adalah sebesar 0,0120 dan 0,3196. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap IPM, dan pengaruh tersebut berarah positif. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belanja modal di daerah berhasil meningkatkan status pembangunan manusia di daerah. Belanja modal berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan manusia diduga disebabkan oleh (1) porsi yang tepat dalam APBD, karena kebanyakan pemerintah daerah mengalokasikan sebesar 20% sampai 30% APBD untuk belanja modal, dan (2) belanja modal dialokasikan untuk aset produktif serta pembangunan, sehingga akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta melaksanakan aktivitas ekonomi.

- 5) Belanja pegawai berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Nilai probabilitas dan koefisien variabel dari belanja pegawai terhadap pembangunan manusia masing-masing adalah sebesar 0,5237 dan 0,0600. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa pelaksanaan belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM meskipun pengaruh tersebut berarah positif. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belanja pegawai di daerah tidak efektif dalam meningkatkan pembangunan manusia di daerah. Tidak efektifnya belanja pegawai dalam meningkatkan pembangunan manusia diduga disebabkan oleh (1) porsi yang besar, berkisar antara 40% sampai 50% APBD untuk belanja pegawai dan (2) belanja pegawai tidak menyentuh langsung ke masyarakat, sehingga tidak mempengaruhi pembangunan manusia.

5.2 Saran

Setelah dilaksanakan penelitian untuk melihat pengaruh pelaksanaan belanja pendidikan daerah, belanja kesehatan daerah, belanja modal daerah, dan belanja pegawai daerah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota, beberapa saran dapat disampaikan oleh penulis dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 1) Bagi pemerintah daerah
 - a) Pemerintah daerah diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan komitmennya dalam memenuhi minimum belanja pada sektor pendidikan sebesar 20% dari APBD di luar gaji pendidik, pada sektor kesehatan sebesar 10% dari APBD di luar gaji, dan belanja infrastruktur minimum sebesar 25% dari dana

transfer umum. Pengelolaan belanja wajib tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh layanan dasar publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

- b) Pemerintah daerah di wilayah timur dan 3T diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan belanja wajib sehingga dapat mengejar ketertinggalan ketersediaan sarana dan prasarana dalam memberikan layanan dasar publik seperti layanan pendidikan dan layanan kesehatan.
 - c) Pengalokasian belanja harus diformulasikan secara tepat antara belanja modal dan belanja pegawai, sehingga tercapai efektivitas belanja pada sektor pendidikan maupun pada sektor kesehatan dan terlihat dampaknya terhadap peningkatan status pembangunan manusia.
- 2) Bagi pemerintah pusat
- a) Pemerintah pusat diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi pemenuhan kewajiban daerah, tidak hanya pada sektor pendidikan dan kesehatan tetapi juga di seluruh sektor. Pengawasan tersebut dilakukan tidak hanya pada nominal besarnya belanja, namun juga melihat bagaimana alokasi dari belanja tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
 - b) Selain memantau dan mengevaluasi, pemerintah pusat juga diharapkan mampu mengarahkan belanja daerah agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan dampak yang maksimal di masyarakat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan dari berbagai sudut. Diharapkan keterbatasan penelitian dapat menjadi perhatian untuk diperbaiki di penelitian selanjutnya. Untuk itu disampaikan keterbatasan penelitian sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini menggunakan periode observasi yang pendek, dari tahun 2015 sampai 2018, dengan pertimbangan ketersediaan dan keabsahan data dari pemerintah daerah.
- 2) Observasi penelitian memilih menggunakan 312 kabupaten/kota dari populasi 514 kabupaten/kota dengan pertimbangan kelengkapan data, dan menghindari data-data yang tidak akurat akibat perubahan data antar tahun yang terlalu ekstrem.
- 3) Penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh pelaksanaan belanja daerah dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang digambarkan oleh indikator berupa indeks pembangunan manusia. Pengeluaran publik sendiri tidak menjamin perbaikan capaian sosial, karena diperlukan pula sistem tata kelola yang baik. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat melihat indikator lain yang juga dapat mendeskripsikan kesejahteraan masyarakat di daerah, contohnya dengan melihat bagaimana efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah dapat mempengaruhi pembangunan manusia.